

KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdullah Lingk. Harapan RT. 001 No. Kode Pos. 92981

PENETAPAN

LURAH MALILI NOMOR: 13 /111 / 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Lurah Malili;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Lurah Malili perlu menetapkan tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Pertama yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ; Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kelurahan Malili, seperti

tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023 yang

tidak terpisahkan.

perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan

Ketiga

Ditetapkan di Malili
Lurah

Lurah

Rhisma Octavian M. Tr. Sos

NIP. 19871031 201503 2 003



KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdollah No. ... Kode Pos: 92981

Nomor

: 005 /170 /KML

Malili, 3 Maret 2023

Lampiran

Perihal Uji Konsekuensi Informasi

Publik

Kepada

Yth. 1. Pejabat Struktural

2. Staf PNS

Lingkup Kelurahan

Di

Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2023 yang ada di lingkup Kelurahan Malili, maka diundang kepada saudara(i) untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal

: Senin, 6 Maret 2023

Waktu

: Pukul 08.30 Wita - Selesai

Tempat

: Aula Kantor Lurah Malili

Demikian

disampaikan atas perhatiannya diucapkan

MALILU

banyak

terimakasih.

EC. MA Rhisma Octa Pangkat: Perata Muda Tk. I Nip. 19871031 201503 2003

Tembusan:

- Bupati Luwu Timur di malili, sebagai laporan
- Pertinggal



KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdullah Lingk. Harapan RT. 001 No. Kode Pos: 92981

PENETAPAN

LURAH MALILI NOMOR: 13 /111 / 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Lurah Malili;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Lurah Malili perlu menetapkan tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pamerintahan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik :
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan informasi ;

MEMPERHATIKAN: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor **Tahun 2023**

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kelurahan Malili, seperti

yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023 yang

tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan

perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 6 Maret 2023

Pangkat : Penala Muda Tk. I/ III.b

NIP.19871031 201503 2 003



KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdollah No. ... Kode Pos: 92981

Nomor

: 005 /170 /KML

Malili, 3 Maret 2023

Lampiran Perihal

Uji Konsekuensi Informasi Publik

Kepada

Yth. 1. Pejabat Struktural

2. Staf PNS

Lingkup Kelurahan

Di

Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2023 yang ada di lingkup Kelurahan Malili, maka diundang kepada saudara(i) untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal

: Senin, 6 Maret 2023

Waktu

: Pukul 08.30 Wita – Selesai

Tempat

: Aula Kantor Lurah Malili

Demikian

disampaikan atas perhatiannya diucapkan

banyak

terimakasih.

KEC. MA RHISMA Octa Pangkat : Perata Muda Tk. I

Nip. 19871031 201503 2003

Tembusan:

- Bupati Luwu Timur di malili, sebagai laporan
- Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN MALILI KELUARAHAN MALILI

JI. Haji Abdollah, Lingk Harapan, Kec. Malili, 92981 Sulawesi Selatan

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal

: Senin / 6 Maret 2023

Tempat

: Aula Kantor Lurah Malili

Agenda

: Rapat Uji Konsekuensi Informasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Lhisma Octaviany	Lurah	1 - 1000
2	Tona ren w	belen	Top
3	Rusman	tasi pemp	3
4	FITRIANI . A.md	Kasi PMD	4 1
5	Syamsurya	Bup	5 th2
6	Syamsurya Mikraya	STAF	6
7			7
8			8
9			9
10			10

UPA Malili, 6 Mare 2023 Lurah Malili, KELURAHAN MALILI Rhisma Oct MA Pangkat : Penath Wood tk. I /III.b NIP.19871031 201503 2003

PPID PELAKSANA : KELURAHAN MALILI

Jangka waktu	Bentuk informasi yang	Waktu dan tempat	Penanggungjawab	Pejabat yang menguasai	Ringkasan isi Informasi	.oN
Penyimpanan/ Retensi	tersedia	isemnoîni neteudmeq	pembuat/penerbit	isemnoîni	remunicum iei unenvigum	
Sampai kasus selesai secara hukum	YqoJ flog	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Informasi mengenai data penerima Penerima Bansos (DTKS)	τ
	Soft Copy	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kasi Ретрегdayaan Маsyarakat	Informasi Data kasus Stunting	1 7
Sampai kasus selesai secara	YdoJ HoZ	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	nformasi Data Kepemilikan Pengeboran) Tanah, Jata Pajak PPB-P2	3 (
Sampai kasus selesai secara	Soft Copy	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	ata Kependudukan erkait identitas warga	a t
Sampai kasus selesai secara hukum	Soft Copy	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Kasi Trantib	Kasi Trantib	sta warga terlibat kasus onflik pidana/perdata rta data warga yang ah termediasi akibat nflik	tel sei

2023

,ilileM

Diketahui:

ilileM deruJ

Rhisma Octaviary, M. Tr. Sos Pangkat : Pendta Muda Tk. I/ III.b NIP. 19871031 201503 2003

NOMOR: KABUPATEN LUWU TIMUR LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH MALILI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR: PPID KELURAHAN MALILI **TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Kantor Lurah Malili, dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

μ				
Da (Pu Paj	iv		-	ON
Data tentang Kepemilikan (Pengeboran) Tanah, serta data Pajak PBB-P2	Mengenai Data Kasus Stunting	Mengenai data Penerima Bansos (DTKS)	2	INFORMASI
 Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	 Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting 	1. Pasal 17 huruf j Undangsa- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	w	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI
 Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menerbitkan kembali sertifikat baru 	 Dapat menggangu psikologi orang tua kasus stunting 	Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain		KONSEKUENSI /PERTI
- Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	 Dapat menghindarkan dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain. 	- Penerima memiliki privasi dalam hal ini, bahwa data penerima sebagai warga miskin, tidak diketahui oleh orang lain		KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK DIBUKA DITUTUP
Tidak terbatas , selama masih digunakan	Tidak terbatas , selama masih digunakan	Tidak terbatas , selama masih digunakan		JANGKA WAKTU

ъ	4	
Data warga terlibat kasus pidana/ perdata serta warga yang telah termediasi akibat konflik	Data kependudukan terkait identitas warga (KTP, KK)	
1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban	1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam bahwa kasus akan dipublikasikan	Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk manipulasi data seperti permohonan pinjaman , pembiayaan dll	
Data warga yang sudah berkonflik tidak tersebar di masyarakat	Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	



Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Fitriani, A. Md	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Malili	h
2 R	usmiati, S. An	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Malili	
Ma	argono	Kepala Seksi Trantib	Kelurahan Malili	An

Malili, 6 Martet 2023

Pangkat : Penata Muda tk. I /III.b NIP.19871081 201503 2003

